

## BAB II

### SITUASI POLITIK PRA PEMILIHAN UMUM

#### A. Kelompok Kekuatan Politik

Sebagai kelanjutan dari Proklamasi 17 Agustus 1945, bagi bangsa Indonesia adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dari segala percobaan dan halangan yang ingin menghancurkan RI, yaitu antara lain; datangnya kembali bangsa Belanda (NICA) ke Indonesia dengan membongkeng sekutu.

Pada masa ini bangsa Indonesia lebih dikenal dengan nama Revolusi fisi, karena banyak terjadi peristiwa baik yang berupa peperangan fisik maupun perjuangan Deplomasi, hal ini berlangsung sampai pada masa pengakuan bangsa Indonesia oleh Belanda secara sah yaitu pada tahun 1949. Pada masa ini di rasakan oleh kaum muslimin sebagai perjuangan untuk agama dan negerinya itu.<sup>11</sup>

Setelah suasana itu, bangsa Indonesia yang merupakan Republik muda ini timbul partai-partai politik, dimana dalam suatu negara yang berdasar Demokrasi maka rakyat berhak mengeluarkan pendapatnya, menyatakan keinginan dan cita-cita tentang kenegaraan yang kemudian disalurkan lewat partai-partai tersebut.

<sup>11</sup> B.J.Boland, Pergumulan Islam, Grafiti Press, Jakarta, Hal.43.

Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan pemerintah Republik pada tanggal 3 November 1945, maka di Indonesia timbulah partai-partai politik. Maka laksana jamur di waktu musim hujan.<sup>12</sup> Mulai saat itu lah di Indonesia timbul banyak partai politik yang menjadi penyulur bagi fikiran-fikiran yang timbul dalam masyarakat dengan cara-cara yang teratur, sebab dari masing-masing partai politik menganut aliran tertentu dan kadang-kadang terdapat perbedaan.

Dari situlah rakyat dapat menyalurkan pendapatnya, bahkan dapat ikut serta dalam pemerintahan negara, apabila dari suatu partai tersebut mendapat kepercayaan rakyat untuk memegang pemerintahan. Pada masa itu terdapat multi partai antara lain; PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katholik, Persatuan Pegawai Polisi RI, Murba Pembela Proklamasi, Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, Partai Republik Rakyat Indonesia Merdeka, Akut, Acoma, Partai Politik Demokrasi Islam, Partai Rakyat Desa, R. Sudjono Prawirosudarso, PIR-Wongso, PIR(Persatuan Indonesia Raya)-Hazairin, Partai Politik Permai, Baperki, Girnda, Persatuan Daya, serta partai perseorangan lainnya.

12 CST.Kansil SH, Parpol dan Golkar, Penerbit Aksara Baru, Hal.27.

Dan dari sekian banyak partai yang ada, partai partai tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok partai besar, antara lain partai Masyumi yang lahir 7 November 1945, yang merupakan wadah cara hidup keagamaan dalam hal ini Islam, setelah itu menyusul pula berdirinya partai Komunis Indonesia yang lahir tanggal 17 Desember 1945, yang merupakan kristalisasi dari falsafah hidup Marxisme dan selanjutnya berdiri pula partai Nasionalis Indonesia (PNI) tanggal 20 Januari 1946 di Kediri, yang merupakan wadah dari faham Nasionalisme.<sup>13</sup>

Dari ketiga faham di atas akan diuraikan dari partai-partai Besar yang ada pada saat Pemilihan Umum pertama tahun 1955, diantara partai-partai besar yang ada pada saat itu, yaitu;

T. Masyumi

Sebagaimana di sebutkan di atas, Masyumi berdiri tanggal 17 November 1945 lain dengan Masyumi yang berdiri pada masa Jepang, Masyumi yang berdiri pada saat ini merupakan keputusan Kongres Muktamar Islam di Yogyakarta, yang di hadiri hampir semua tokoh berbagai Organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang, dengan berdirinya Majelis Syura mereka

13

B.J.Boland, Op Cit, Hal.44

memutuskan bahwa partai politik Masyumi di anggap satu-satunya partai politik bagi Umat Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

Dari keputusan yang disetujui pada tahun 1945 di Yogyakarta itu; maka satu-satunya wadah Organisasi Islam di Indonesia yang diakui semesta jak berdirinya hingga sampai bubarinya (1960) yang mencakup berbagai organisasi yang ada di Indonesia, baik yang berdiri sebelum masa penjajahan maupun organisasi yang berdiri pada masa kemerdekaan yang baru diProklamasikan.

Dalam tubuh Masyumi pada saat itu terdiri dari dua macam anggota, yang meliputi perorangan dan organisasi, yang dibatasi umur 18 tahun atau sudah pernah kawin, diantara organisasi yang ada dalam Masyumi mula-mula empat organisasi ; Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Perikatan Umat Islam, dan Pertasuan Umat Islam. Yang mana Muhammadiyah merupakan organisasi pembaharu dan Nahdlatul Ulama' Tradisional, dan lainnya cenderung bersikap modenr dalam soal dunia dan tradisional dalam soal agama, dari situ memudahkan kedua organisasi bekerja sama dalam kalangan modernis yang akhirnya pada tahun 1951 kedua partai ini menjadi

14 Dilear Noer, Partai-Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Press, Jakarta, 1987. Hal.47.

pemersatu Umat Islam Indonesia.<sup>15</sup>

Seperti halnya yang diuraikan di atas bahwa Masyumi yang berdiri pada saat ini bukan seperti Masyumi pada masa Jepang yang banyak pendukungnya dan kalau di lihat dari sosiologi Umat yang ada maka pendukung dari partai baru ini, adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.<sup>16</sup> Dari keanggotaan yang telah menjadi pendukung utama maka dapat dikatakan bahwa partai yang baru ini merupakan kelanjutan dari MIAI, akan tetapi kali ini hanya mengkhususkan perjuangannya di bidang Politik dalam rangkah menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia yang merdeka.

Pada uraian di atas telah diuraikan tentang lahirnya Masyumi, dengan adanya kongres Muktamar Yogyakarta. Tercatat sebagai ketua penyelenggara Kongres Muktamar tersebut yaitu Moh. Natsir, dengan anggota-anggotanya, seperti; Soekiman Wiryo-senjojo, Abikusno Tjokroyujoso, A.Wahid Hasyim , Wali Al-Fatah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan A.Ghaffar Ismail. Di mana dalam kongres Muktamar itu telah menghasilkan keputusan bahwa :

15 Dilear Noer, Ibid., Hal. 49.

<sup>16</sup>  
Drs. A. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik di Indonesia, IAIN Sunan Kali Jaga Press, Yogyakarta. Hal. 30.

1. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia.
  2. Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib (politik) Umat Islam Indonesia.

Dimana Masyumi pada periode awal ini terdiri dari Majelis Syura yang di ketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan pengurus besar(badab eksutif) yang di ketuai oleh Soekiman Wiryo sendjojo, dan Moh.Natsir sendiri, pada periode awal ini sebagai anggota pengurus besar.<sup>17</sup>

Kalau di lihat dari hasil kongres Muktamar yang salah satunya menyebutkan bahwa tujuan berdirinya Masyumi memperjuangkan nasib politik Umat Islam Indonesia, maka dari hal ini jelaslah bahwa pembentukan Masyumi pada waktu itu dibentuk dalam rangkah menyalurkan Aspirasi politik Umat Islam sebagai serminan dari potensi mereka yang besar dan kongkrit. Dan dari keputusan yang ada itu, maka Umat Islam Indonesia tidak memiliki partai politik yang lain selain Masyumi.

## II. Partai Komunis Indonesia

Sebagaimana yang telah disinggung di atas yang tergolong juga sebagai tiga partai besar yaitu Partai Komunis Indonesia, dimana partai ini merupakan kristalisasi dari faham hidup Marxis.

17

Syafi'i Ma'arif, Ibid, Hal.31.

Nama PKI ini baru mulai dipakai pada tahun 1920, tetapi karena PKI ini sebenarnya kelanjutan atau pejelmaan dari partai yang didirikan pada tahun 1913, jadi menurut chronologinya tahun itu berdiri sebuah partai yang dinamakan Indische Sociaal Demokratische Vereeniging disingkat ISDV yang didirikan oleh orang-orang Belanda bersama-sama bangsa Indonesia. ISDV ini mula-mula berusaha mencari kontak dengan Indische Partij dan SI untuk dapat mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Jadi ISDV tidak dapat meluas dikalangan bangsa Indonesia kemudian pada tahun 1920 diputuskan untuk merubah nama ISDV menjadi "Perserikatan Komunis Hindia".<sup>18</sup>

Dan untuk lebih jelasnya tentang keikutsertaan Partai Komunis Indonesia dalam Pemilihan Umum Pertama ini ada dalam hubungannya dengan partai-partai yang ada.

### III. Partai Nasionalis Indonesia

Sebagaimana yang ada pada uraian di atas, bahwa partai Nasionalis Indonesia ini termasuk dari tiga partai besar yang ikut dalam pesta pemilihan umum pertama di Indonesia. Dimana partai ini merupakan wadah bagi Nasionalis bangsa, maka dapat di

18  
Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1989. Hal. 56.

Katakan bahwa partai Nasionalis ini lahir di : latar belakangi oleh adanya Algement Club di Bandung yang menyatakan dirinya menjadi suatu partai yang mereka cetuskan pada tanggal 4 juli 1927, yang mereka beri nama Partai Nasionalis Indonesia.

Partai Nasionalis Indonesia ini di Pimpin oleh IR. Soekarno yang mana partai ini didirikan dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka dengan mempunyai tiga prinsip yang antara lain untuk meolong diri sendiri, Non kooperasi dan Kaum Marhaenisme. Dalam partai ini juga mempunyai program yang merupakan keputusan dari kongresnya yang pertama di Surabaya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun Nasionalisme yang intinya satu yaitu bertujuan memajukan dari hal-hal yang berhubungan bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia ini dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.<sup>19</sup>

## B. Hubungan Antar Partai-PARTAI Politik Besar

Sebagaimana dalam fasal awal yang memberikan gambaran secara sekilas tentang partai-partai yang ada setelah kemerdekaan khususnya keadaan partai politik menjelang pemilihan umum pertama di Indonesia. Maka dalam fasal ini akan diuraikan bagaimana keadaan dan hubungan antara partai-partai politik besar yang hidup pada masa tersebut.

<sup>19</sup> Drs. Susanto Tirtoprodjo, Ibid, Hal. 77.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan bagaimana persaingan antar partai yang ada dan hidup dalam situasi kabinet parlementer. Sebagaimana halnya kurun waktu selama perang kemerdekaan (1945-1950) dapat di kelompokkan sebagai zaman harapan tipis terdapatnya persatuan dalam perjuangan.

Maka tahun-tahun antara 1950-1955 dapat disifatkan sebagai periode pertentangan partai, dimana masalah yang menjadi persoalan adalah soal Riel (dalam pertentangan itu sama banyaknya baik masalah kedudukan, jabatan, dan kepentingan Komersial) serta masalah Idiologi dan masalah adanya pertentangan orang-orang Islam dengan partai komunis, khususnya partai Nasionalis (PNI) dalam menghadapi pemilihan Umum yang pertama ini.<sup>20</sup>

Dari kenyataan yang ada, Negara RI yang baru ini telah resmi menjadi negara yang bersistim parlementer, dan dari tatanan yang berbentuk parlementer itu, bangsa Indonesia terbagi menjadi 10 propensi yang mempunyai otonom dan dalam relatif singkat di Negara RI telah terjadi 4 kali pergantian kabinet yang berjarak dari tahun 1950 sampai tahun 1955 sehingga rata-rata tiap tahun terjadi pergantian kabinet.<sup>21</sup>

20

B.J.Boland , Op Cit, Hal.50.

21

Nugraha Noto Susanto, Sejarah Nasional Indonesia, VI, Penerbit. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, HAI:80.

Dalam hal ini dapat dilihat dari pergantian kabinet diantaranya yaitu;

Kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 merupakan kabinet koalisi, Walaupun PNI sebagai partai terbesar kedua tidak ikut dalam parlemen, hal ini di sebabkan PNI merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dan inti dari kabinet ini adalah Masyumi, sebagaimana tabel yang ada :

Kabinet Natsir

Perdana Menteri	Mohamad Natsir	Masyumi
Wakil Perdana Menteri	Hamengkubuwono IX	-
Menteri Luar Negeri	Mr. Mohamad Roem	Masyumi
Menteri Dalam Negeri	Mr. As saat	-
Menteri Pertahanan	Dr. Abdul Halim	-
Menteri Kehakiman	Mr. Wongsonegoro	PIR
Menteri Penanaman	M.A. Pellaupessy	Demokrat
Menteri Keuangan	Mr. Safruddin Pratirang	
Menteri Pertanian	Wiranegara	Masyumi
Menteri Perdagangan dan Industri	Mr. Tandiono Maun	PSI
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Dr. Sumitro Djojohadikusumo	PSI
Menteri Perhubungan	Ir. H. Johannes	PIR
Menteri Perburuhan	Ir. Djuanda	Parkindo
Menteri Sosial	R.P. Suroso	Parindra
Menteri Pendidikan Pengajaran, Kebudayaan	F.S. Harjadi	Katholik
Menteri Agama	Dr. Bahder Djohan	-
Menteri Kesehatan	K.H.A. Wahid Hasyim	Masyumi
Menteri Negara	Dr. Johannes Leimena Harsono Tjokroamianto	Parkindo
		PSII <sup>22</sup>

Dalam kabinet inipun tidak luput dari segala permasalahan, dimana banyak pemberontakan yang dilancarkan di daerah-daerah seperti yang dilakukan oleh tentara Hisbullah, yang tidak mau mundur akibat dari perjanjian Remville dengan menyebut dirinya "Darul Islam" serta banyak lagi yang lain.

Di samping soal keamanan yang menjadi beban Pemerintah juga soal pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia. Belanda yang rupanya tidak bermaksud mengembalikan Irian Barat ke Indonesia dan untuk mengatasinya maka diajukan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai 4 Desember 1950 semasa kabinet Natsir. Tetapi perundingan itu mengalami jalan buntu sebab masing-masing pihak tidak beranjak dari pendiriannya, hal ini menyebabkan Mosi tidak percaya pada parlemen terhadap kabinet, dan krisis menjadi mendalam dengan adanya Mosi yang dikeluarkan Hadi Kusumo (PNI) tentang pencabutan PP no. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang di terima baik oleh parlemen sehingga menyebabkan kabinet Natsir jatuh.<sup>23</sup>

Setelah kabinet Natsir jatuh, maka Prasiden Soekarno menunjuk beberapa formatir yang akhirnya terbentuklah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi.

23

<sup>10</sup> Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal.85.

Dimana pada saat itu, Presiden menunjuk 2 formatur baru yaitu sidik Djojosukarto(PNI) dan Dr.Soe-kiman Wirjosandjojo(Masyumi) untuk membentuk kabi - net koalisi dengan dasar Nasional yang luas dan akhirnya kabinet baru itu di umumkan sususnan kabi- net yaitu tanggal 26 April 1951, diantara partai po- litik yang duduk dalam kabinet ini yaitu :

Kabinet Soekiman

Perdana menteri	Dr. Soekiman Wirjosan djojo	Masyumi
Wakil Perdana Menteri	Suwirjo	PNI
Menteri Luar Negeri	Mr. Ahmad Subardjo	Masyumi
Menteri Dalam Negeri	Mr. Ishaq Tjokroadi surya	PNI
Menteri Pertahanan	Siwaka	PIR
Menteri Kehakiman	Mr. Muhamad Yamin	-
Menteri Penerangan	Arnold Mononotu	PNI
Menteri Keuangan	Mr. Yusuf Wibisono	Masyumi
Menteri Pertanian	Ir. Suwarto	Katholik
Menteri Perdagangan dan perindustrian	Mr. Sujono Hadinoto	PNI
Menteri Perhubungan	Ir. Djuaanda	-
Menteri Pekerjaan Umum	Ir. Ukar Brat Kusumah	PNI
Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjakusumah	Buruh
Menteri Sosial	Dr. Sjamsuddin	Masyumi
Menteri Pendidikan dan pengajarn, kebudayaan	Mr. Wongso Negoro	PIR
Menteri Agama	K.H.A. Wahid Hasyim	Masyumi
Menteri Kesehatan	Dr. Johannes Leimena	Parkindo
Menteri soal-soal umum	M.A. Pelaupissky	Demokrat
Menteri Kepegawaian Negeri	R.P. Suroso	Parindra
Menteri Agraria	Gondo Kusumo	PIR

Kabinet ini pun tidak berusia lama karena banyaknya soal yang mendapat tantangan dari parlemen maupun PNI dan Masyumi sendiri. Dan pendukung utama dari jatuhnya kabinet ini yaitu akibat ditandatanganinya bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat pada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA), persetujuan itu di tafsirkan bahwa Indonesia telah memasuki blok Barat (AS) yang berarti bertentangan dengan program kabinet yaitu politik Luar Negeri yang bebas dan aktif.

Setelah beberapa waktu lamanya pengembalian mandat kepada Presiden Soekarno, maka pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya, dan program kabinet ini ditujukan terutama pada persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Konstituante, DPR serta DPRD, Kemakmuran, Pendidikan Rakyat dan keamanan serta program Luar Negeri yang ditujukan pada masalah pengembalian Irian Barat ke Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda.

Di samping itu banyak lagi yaitu persoalan kesukuan yang ada di Indonesia sendiri, diantara partai-partai duduk dalam parlemen masa kabinet Wilopo :

Kabinet Wilopo

Perdana Menteri Mr. Wilopo PNI  
Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito Masyumi

Menteri Luar Negeri	Mr. Wilopo	PNI
Menteri Dalam Negeri	Mr. Mohamad Roem	Masyumi
Menteri Pertahanan	Hamengkubuwono IX	-
Menteri Kehakiman	Mr. Lukman Wirya Dinata	PSI
Menteri Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
Menteri Keuangan	Dr. Sumitra Djojohadi Kusumo	PSI
Menteri Pertanian	Mohamad Sardjan	Masyumi
Menteri Perekonomian	Mr. Sumanang	PNI
Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	-
Menteri Pekerjaan umum	Ir. Suwarto	Katholik
Menteri Perburuhan	I. Tedjasukmana	Buruh
Menteri Sosial	Anwar Tjokroaminoto	PSII
Menteri Pendidikan, Penga- jaran dan kebudayaan	Dr. Bahder Djohan	-
Menteri Agama	K.H. Fakih Usman	Masyumi
Menteri Kesehatan	Dr. Johannes Leimena	Parkindo
Menteri Kepegawaian Negeri	R.P. Suroso	Parkindo <sup>25</sup>

Sebagai kabinet yang sebelumnya, dalam kabinet ini pun mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan programnya, hal ini di sebabkan dari berbagai hal : Peristiwa 17 Oktober, Peristiwa Tanjung morawa dan pada tanggal 16 Maret 1953 polisi dengan kekerasan mengusir penduduk liar dari tanah garapan yang sudah lama di tinggalkan oleh pengusaha perkebunan, penduduk yang dihasut oleh kader-kader Komunis Indonesia menolak untuk pergi, sebagai akibat terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Dengan peristiwa ini mendapat banyak sorotan baik dari kalangan Press maupun Parlemen, mosi tidak percaya dilancarkan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden ,

kabinet kembali Demisioner dan Indonesia mengalami krisis pemerintahan.<sup>26</sup>

Setelah mengalami krisis yang agak lama(58 hari) akhirnya kabinet baru terbentuk, dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum Pemilihan Umum I dan terkenal dengan nama kabinet Ali I atau kabinet Ali-Wongso, kabinet ini di resmikan pada tanggal 31 Juli 1953 dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, dan sebagai gantinya Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai kekuatan politik baru. Sebagaimana tabel di bawah ini adalah partai yang duduk dalam kabinet Ali I :

Kabinet Ali I

Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Wongsonegoro	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Zainul Arifin	NU
Menteri Luar Negeri	Mr. Sunario	PNI
Menteri Dalam Negeri	Mr. Dr. Hazairin	PIR
Menteri Pertahanan	Mr. Iwan Kusuma Sumantri	Progresif
Menteri Kehakiman	Mr. Djody Gondokusumo	PRN
Menteri Penerangan	Dr. L.F. Tobing	SKI
Menteri Keuangan	Dr. Ong Eng Die	PNI
Menteri pertanian	Sudjarwo	BTI
Menteri Perekonomian	Mr. Iskaq Tjokrodisurya	PNI
Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso	PSII
Menteri Pekerjaan umum	Ir. Rooseno	PIR
Menteri Perburuhan	S.M. Abidin	Buruh
Menteri Sosial	R.P. Suroso	Parindra
Menteri Pendidikan, pengajaran, kebudayaan	Mr. Moh Yamin	-
Menteri Agama	K.H. Masjkur	NU

<sup>26</sup> Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal.90.

Menteri Kesehatan	Dr. L.P. Tobing (ad Intern)	SKI
Menteri Negara dengan tanggung jawab soal Agraria	Moh Hanafiah	NU
Menteri Negara Dengan tanggung jawab kesehjateraan Negara	Sudibjo	PSII 27

Walaupun kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan sebagai kabinet yang paling lama dalam bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya sebab yang utama yaitu kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober. Di samping itu juga karena keadaan perekonomian yang semakin buruk dan korupsi yang meningkat yang menyebabkan kepercayaan rakyat merosot.

Di lihat dari beberapa data di atas, maka tampak bagaimana hubungan yang ada antara partai-partai politik seperti : Masyumi, PNI, dan PKI dalam kursi pemerintahan, yang mengakibatkan ... pergahtian kabinet berkali-kali dan sampai ada dalam setahun ... terjadi pergantian kabinet 2 kali. dari sinilah akan diuraikan hubungan yang di jalankan diantara partai-partai tersebut, sehingga mengakibatkan sampai berlarutnya Pemilihan Umum Pertama di Indonesia yang selama ini tertunda-tunda pelaksanaannya.

27 Dilear Noer, Op Cit, Hal.240.

Kalau dilihat dari partai yang ada pada masa itu, maka dari masing-masing partai terutama PNI dan Masyumi yang merasa dirinya menjadi partai besar berusaha untuk menjadi formatir kabinet. Dengan demikian akan menduduki jabatan perdana menteri, dengan begitu maka partai yang bersangkutan dapat mehentukan program kabinet yang dijadikan landasan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang di hadapi menurut anggapan dan penilaian yang benar dan tepat.

Dalam kenyataannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada satu partai pun yang mempunyai kekuatan suara mutlak. Maka dalam pembentukan kabinet tidak bisa tidak, kabinet yang dibentuk haruslah bersifat Koalisi yakni kabinet yang terdiri dari partai-partai yang suaranya dalam parlemen dapat diandalkan dukungannya.<sup>28</sup>

Memang dari partai yang ada, pada masa tahun 1950 adalah Masyumi dan PNI. Dimana kedua partai ini yang banyak berkecipung dalam pemerintahan di banding dengan partai Komunis, yang pada saat itu tidak begitu muncul dalam pemerintahan.

28

I.N.Soebagijo , K.H.Masjkur Sebuah Biografi,  
Penerbit.Gunung Agung, Jakarta,MCMLXXXII, Hal.162.

Kedua partai tersebut (PNI dan Masyumi) pada tahun 1950-1955 mempunyai sikap yang berbeda. Pada saat Revolusi kedua partai ini lebih mencerminkan kerja sama antara mereka, baru setelah penyerahan kedaulatan itulah hubungan kerja sama itu mulai merenggang. Pada umumnya mereka lebih berusaha untuk mendapatkan tempat dengan memberi dukungan kepada formatir agar dapat masuk kabinet.

Partai-partai Masyumi dan PNI sendiri tidak  
satu kata. Terbukti saat kabinet Hatta terpilih,  
saat itu Masyumi hanya menerima 4 kursi, sedang  
PNI 3 kursi, padahal partai Masyumi pada mulanya  
telah membina organisasi kedalam, setelah penyera-  
han dan bukan untuk mempersebutkan kedudukan dalam  
pemerintahan. Hal itupun telah di sadari dengan  
tidak terbinanya tubuh kepemimpinan dalam tubuh  
Masyumi secara organisatoris.<sup>29</sup>

Dari kedudukan yang ada, maka Masyumi sejak awal kabinet parlementer telah menduduki posisi yang boleh dikatakan baik antara lain; Menteri keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pengajaran, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Negara.<sup>30</sup>

---

29

Dilear Noer, Op Cit, Hal.200.

30

Ibid, Hal. 202.

Melihat pengalaman yang ada pada masa kabinet Hatta, maka bangsa Indonesia yang semula berbentuk RIS akhirnya berubah menjadi bentuk RI resminya 19 Mei 1950. Dari masa kabinet Hatta itulah terdorong untuk membentuk kabinet koalisi dalam masa kabinet parlementer.

Kabinet ini hanya terbentuk dengan sistem koalisi partai yang hal ini di tentukan oleh UUD 1950. Terutama karena komposisi parlemen tidak memungkinkan pembentukan kabinet dengan satu, dua partai saja, dalam rangka ini pola yang idial ialah bila Masyumi dan PNI bersama-sama duduk dalam kabinet, sehingga mendorong partai-partai lain berada dalam posisi tambahan.<sup>31</sup>

Dari kenyataan yang ada itu, maka setelah kabinet Hatta jatuh, Masyumi duduk dalam posisi terpenting . Begitu pula halnya dalam kabinet Natsir yang memerintah pada tanggal 6 September 1950, Masyumi mendapat kedudukan penting , walaupun PNI sebagai partai kedua terbesar akan tetapi tidak turut dalam kabinet, salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ialah karena mereka tidak diberi kedudukan yang sesuai dan inti kabinet ini adalah Masyumi.<sup>32</sup>

Ibid, Hal. 203.

Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal.81.

Dalam kabinet Natsir ini antara Masyumi dan PNI terjadi ketidak seimbangan. Hal itu terbukti dengan terangkatnya Natsir sebagai formatir 20 Agustus yang bermaksud membentuk kabinet dengan dukungan partai sebanyak mungkin agar kabinetnya mencerminkan sifat Nasionalisme, akan tetapi akibat PNI yang tidak ikut serta dalam kabinet.

Hal inilah yang mengakibatkan sampai berlarutnya pembentukan kabinet, pada saat itu Natsir yang dibantu Safruddin Prawiranegara dan Wahid Hasyim berpendapat bahwa:

Partai Masyumi mempunyai lebih banyak hak dibanding dengan partai manapun, sebaliknya dari sikap tersebut PNI menuntut hak sama dengan Masyumi, bukan saja dalam jumlah kursi yang hendak diduduki melainkan juga dalam menentukan kursi-kursi mana yang hendak dibagi antara Masyumi dan PNI, dimana PNI menghindaki agar PNI dan Masyumi masing-masing mempunyai empat kursi.<sup>33</sup>

Pada masa kabinet Hatta, PNI duduk dalam kabinet hanya 3 kursi, oleh karena itu pada masa kabinet ini partai PNI menuntut agar pembagian kursi dipersamakan keduanya.

Demikian juga PNI, pada masa kabinet Natsir ini menghendaki kursi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Luar Negeri serta Menteri Muda, sedang kursi yang lainnya di sediakan untuk

partai-partai lain termasuk satu partai untuk Irian Barat.

Dalam pembicaraan dengan formatir, PNI bersedia melepaskan kursi Luar Negeri kepada Masyumi, dan Menteri Pendidikan kepada yang lain. Tetapi PNI tetap menuntut kursi Menteri Dalam Negeri, karena PNI meraakan ketidak adilan bila Masyumi menduduki kursi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri yang akhirnya mengakibatkan ketidak sediaan formatir Natsir dalam memenuhi keinginan PNI.

Akhirnya kursi yang di perebutkan PNI dan Masyumi itupun terbentuk, dengan Masyumi tetap sebagai partai yang dominan. Masyumi menduduki 4 kursi, yang ada dalam posisi Perdana Menteri, Menteri Luar Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, sedang yang lain di duduki 2 PSI, 2 PIR, 2 Kristen (katholik dan Protestan), 1 PSII, 1 Demokrat, dan 4 tanpa partai.

Kabinet ini dalam hitungan memperoleh dukungan, 50 anggota Masyumi, 18 PIR, 16 PSI, 11 Demokrat, 9 Parindra, 8 Katholik, 6 PNI Merdeka, 5 PSII dan 4 Parkindo yang ada dalam parlemen.<sup>34</sup> Pada kabinet ini PNI menjadi partai oposisi, meliputi PKI dan kawan-kawannya ( 29), BTI (5) dan partai buruh yang bersifat netral.

34

Ibid, Hal. 205.

Kiranya partai Masyumi yang saat itu mulai di atas angin, kini mulai surut kembali. Dalam kepemimpinan ini kelemahannya terletak pada ketidak berhasilan Masyumi menarik PNI ikut dalam kabinet, yang mereka harapkan adalah kabinet koalisi yang melambangkan Nasionalisme dengan banyak partai yang dukuk dalam kabinet. Tetapi dalam kenyataan yang ada Masyumi tidak sanggup memegang tapuk kepemimpinan yang diembannya, sehingga dalam golongan Masyumi sendiri juga mengalami Pro dan Kontra.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam suatu perang pernyataan yang timbul antara kalangan Masyumi sendiri, yang di mulai oleh yusuf Wibisono pejabat ketua partai dalam suatu wawancara dengan katot Berita Antara yang mengatakan bahwa pengembalian mandat oleh Natsir kepada presiden merupakan jalan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan pemerintahan yang berbicara untuk kepentingan Negara dan Masyumi.

Yusuf mengemukakan dua alasan mengapa Natsir harus mengembalikan mandatnya : pertama; karena mosi Hadi kusumo. Kedua karena kegagalan Konfrensi tentang Irian Barat. Di samping itu Ia berpendapat orang-orang yang tidak berpartai seharusnya tidak masuk kabinet, mereka dapat pergi main bola atau piknik tanpa diawasi siapapun, Ia menambahkan bahwa tidak seorangpun yang bertanggung jawab.<sup>35</sup>

35 Ibid, Hal. 213.

Dari berbagai alasan yang ada ... penyelaman dari tubuh Masyumi. Dengan tidak ikut sertanya PNI dalam kabinet, yang menyebabkan ketidak sempuan Masyumi duduk dalam pemerintahan karena kurang dukungannya dari partai terbesar yaitu PNI itu sendiri, akhirnya pada saat itu Natsir : menyerahkan mandatnya kepada presiden hal ini terjadi tanggal 21 Maret 1951.

Kegagalan yang telah dialami oleh partai Ma-syumi ini menjadikan partai ini terbiasa dengan sistem parlementer. Oleh karena itu pembentukan kabinet di serahkan kepada yang menjadi oposisinya yaitu Partai Nasionalis Indonesia.

Dan presiden juga berfikir sejalan dengan ini akhirnya PNI juga berusaha untuk membentuk sistem pemerintahan seperti apa yang diusahakan oleh Partai Masyumi dengan bentuk koalisi antara Partai Nasionalis Indonesia dan Masyumi. Walaupun kedua partai ini pada dasarnya tidak akan pernah menemukan kecocokan semenjak penyerahan Belanda ke Indonesia, akan tetapi pembentukan kabinet tidak semudah sebagaimana yang diucapkan oleh PNI di saat awal 1950.

Terbukti dengan pengembalian mandat Mr. Sarto-no tanggal 18 April 1951 kepada presiden.<sup>36</sup>

36

Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal.85.

Dan kursi kepemimpinan beralih lagi ketangan Masyumi, pada masa ini antara PNI dan Masyumi sama-sama masing memperoleh 5 kursi, PIR 3, Parkindo , emokrat, Katholik, masing-masing 1, ada 3 Menteri tanpa partai, PSII dan PERTI pada masa itu tidak duduk di dalamnya.

Dari kenyataan yang ada, duduk dalam kabinet masih tetap dari Masyumi. Secara langsung maupun tidak program yang ada merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Susunan kabinet masa itu sudah bisa dikatakan sebagai kabinet koalisi, karena partai yang duduk di dalamnya menjadi partai besar Indonesia yang mayoritas anggotanya di pegang oleh Masyumi dan PNI.

Kiranya persaingan dan perpecahan antara partai-partai yang ada selama menghadapi Pemilihan Umum ini kian memuncak dan semakin parah, baik dari partai Islam sendiri maupun dari partai yang berdiri sendiri dan ikut dalam kampanye pada saat menghadapi Pemilihan Umum ini.

Sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa antara partai yang ada terutama PNI dan Masyumi yang saling berebut mencari pengikut, jabatan dan kedudukan pemerintahan yang menimbulkan pertarungan antar partai yang mencapai puncaknya pada tahun 1952.

Perebutan kekuasaan pada saat itu : semakin

tidak baik, baik dari kalangan Masyumi maupun PNI yang saling menginginkan kursi kabinet pada saat itu kursi kabinet di pegang dari kalangan PNI, sedangkan Masyumi mendapat 4 kursi, terbukti pada masa Wilopo ini tidaklah terlalu beruntung, bukan karena kerja sama antara para menteri melainkan karena hubungan antara menteri dan partainya di luar kabinet.

Begitu juga dengan partai PNI, pada saat itu mendapat 4 kursi, pada saat itu 2 partai pendukung dari kabinet yang ada malah tidak mencerminkan hubungan, baik hal ini di sebabkan adanya perperebutan kursi luar negeri, pada saat itu juga Partai komunis Indonesia mulai terlihat dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa, dimana PKI pada saat itu mendukung pada orang-orang Cina dan sebagian penduduk pribumi dengan adanya pengembalian daerah perusahaan tembakau kepada pemerintahan Belanda. Dari kedua golongan itu penolakan yang dilakukan tampaknya merupakan dorongan partai Komunis Indonesia.

Kiranya bangsa Indonesia yang saat itu terbentuk kabinet parlementer, keadaan bangsa semakin tidak menguntungkan karena sering terjadinya kevakuman pemerintahan. Hal ini tak lain karena saling berkuasanya partai-partai yang ada, dari keadaan ini kiranya PKI mulai tahun 1953 ini ikut aktif di dalam parlemen.

Semula semua partai memang menjadi tulang punggung pemerintahan yaitu PNI dan Masyumi, setelah kabinet wilopo jatuh terjadi ketidak seimbangan, dan sejak awal kabinet parlementer berjalan kedua partai inilah yang menjadi inti dari kabinet.

Dari salah satu tokoh PNI lain yaitu Mangun Sangkoro mengatakan bahwa :

Kabinet baru "kalau mungkin" terdiri dari wakil Masyumi dan PNI menjadi poros, tetapi "kalau tidak mungkin" kabinet membiarkan salah satu dari padanya di luar dan PKI menghimbau pembentukan suatu pemerintahan formal yang bersatu" tetapi tidak mengesampingkan Masyumi dan PSII.

Dari uraian di atas terlihat bahwa selama kabinet parlementer PKI tidak begitu banyak bersua-ra dalam parlemen dan tidak memperlihatkan adanya permusuhan dengan partai-partai yang ada. Baru setelah tahun 1953 persaingan dengan partai-partai yang ada telah kelihatan, khususnya dengan partai Masyumi dan PSI yang merupakan salah satu partai Islam yang ada pada masa itu, dimana PKI dengan jelas ingin menyikirkan partai Islam yang selama ini terlihat baik dan banyak duduk dalam kursi kabinet dengan posisi yang telah menjadi perebutan partai-partai yang ada.

Dari pembahasan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa tahun 1953 merupakan puncak persaingan dan perpecahan antar partai-partai yang ada.

Di samping ketegangan antar partai ,<sup>sketegangan</sup>  
juga bertambah antara partai oposisi dan pre -  
siden. Yang menuduh beberapa pemimpin bangsa Indo -  
nesia sendiri bekerja sama dengan bangsa Asing dalam  
rangkah saling menghancurkan <sup>pedengan</sup> dengan cara menuap  
negar dengan uang berjuta-juta yang bertujuan untuk  
menjatuhkan .

Hal ini di kamukakan karena terlihat <sup>jelas</sup>  
adanya Masyumi tidak mendapat kursi sama sekali ,  
kursi kabinet di duduki 4 dari PNI, 3 dari NU dan  
partai lainnya, oleh karena itu Masyumi yang men -  
jadi partai oposisi tetapi tidak sampai menjatuhkan  
kepemimpinan yang ada dan kalau di lihat pada dasar  
nya ini di sebabkan adanya NU yang keluar dari tu -  
buh Masyumi, sehingga partai yang lain menggunakan  
kesempatan yang ada untuk mengadu domba partai NU  
dan Masyumi,

Dari pengalaman yang berjalan bertahun-tahun  
dengan berbagai corak dan sistim yang bermacam-macam  
juga terlahir dari berbagai golongan partai, maka  
salah satu program kabinet yang berupa <sup>1.</sup> Pemilihan  
Umum semakin dekat hal inilah yang menuntut dari  
semua partai untuk mewujudkan yang selama ini me -  
nyebabkan ketegangan di antara bangsa Indonesia sen -  
diri.

Maka pada tahun 1955 ini, PNI dan Masyumi dijadikan poros yang di harapkan dapat menjembatani keadaan kabinet dan bertugas untuk mengembalikan wibawa pemerintah termasuk kepercayaan dari tentara dan masyarakat umum menurut rencana yang tetap.

Sehingga pembentukan parlemen dapat pula terjamin dan akhirnya pada masa itu parlemen memberikan kesempatan kepada Boerhanuddin Harrahap dari partai Masyumi untuk melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri.

Dalam hal ini, di dukung 135;2 suara para pendukung, termasuk Masyumi, NU, PSII, PIR, Parindra Katholik, Parkindo, PSI, Buruh, Demokrat dan Perti, sedang wakil-wakil PNI, PKI, SKI, tidak hadir waktu pemungutan suara.<sup>37</sup>

Kursi kepemimpinan yang di pegang oleh partai Masyumi ini berkuasa sampai Pemilihan Umum di laksanakan yang selama ini sempat tertunda hingga tahun 1955 ini.

37 Dilear Noer, Op Cit , Hal.245.